



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata: Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (Tahun 2022–2024)

Layali Ihyani¹, Sahdan Saputra², Miftahul Mubin³, Febria Nurmelia Marlina⁴, Ega Dwi Putri Marswandi⁴

¹Departement of Accounting, University of Bumigora, Mataram, Indonesia;

²Department of Engineering, University of Bumigora, Mataram, Indonesia;

³Department of Accounting, University of Mataram, Mataram, Indonesia;

⁴Departement of Management, University of Bumigora, Mataram, Indonesia;

Kata Kunci

Kata kunci: Kinerja keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pariwisata, rasio kemandirian, Lombok Barat

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat periode 2022-2024 dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja, dan rasio kemandirian. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terhadap data realisasi anggaran, dengan dukungan literatur kebijakan fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PAD sektor pariwisata meningkat 21,1% (2023-2024), capaiannya hanya 13-14% dari target, mengindikasikan target yang tidak realistis atau inefisiensi pemungutan. Sektor restoran tumbuh signifikan (+39,3%), tetapi hotel dan hiburan berkontribusi minimal (<7% dan <1%). Di sisi belanja, terjadi ketimpangan antara penyerapan operasional yang tinggi (97,14%) dan modal yang rendah (68,65%), menghambat pembangunan infrastruktur pariwisata. Rasio kemandirian daerah sangat rendah (3,48-3,90%), menggambarkan ketergantungan ekstrem pada transfer pusat (26-27x lipat PAD). Temuan kunci lain adalah kesenjangan antara lonjakan kunjungan wisatawan (+236% dari target 2024) dengan kontribusinya yang terbatas pada PAD. Penelitian ini merekomendasikan: (1) optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui digitalisasi dan penegakan hukum, (2) percepatan belanja modal dengan penyederhanaan regulasi, dan (3) evaluasi target berbasis potensi riil.

Keywords

Keywords: Local government financial performance, Local Revenue (PAD), tourism, fiscal independence ratio, West Lombok

Abstract

This study analyzes the financial performance of the Tourism Office of West Lombok Regency from 2022 to 2024, focusing on Local Revenue (PAD), expenditure, and fiscal independence ratio. Using a descriptive quantitative analysis of budget realization data supported by regional fiscal policy literature, the research reveals that while tourism-sector PAD increased by 21.1% (2023-2024), achievement reached only 13-14% of targets, indicating unrealistic targets or inefficient revenue collection. The restaurant sector grew significantly (+39.3%), but hotels and entertainment contributed minimally (<7% and <1%, respectively). On the expenditure side, a disparity exists between high operational absorption (97.14%) and low capital expenditure (68.65%), hindering tourism infrastructure development. The regional fiscal independence ratio was critically low (3.48-3.90%), reflecting extreme reliance on central transfers (26-27x PAD). Another key finding is the gap between surging tourist visits (+236% above 2024 targets) and their limited contribution to PAD. The study recommends: (1) optimizing local tax collection through digitization and law enforcement, (2) accelerating capital expenditure by streamlining regulations, and (3) target evaluation based on realistic potential.

*Corresponding Author: **Layali Ihyani**, University of Bumigora Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: layali@universitasbumigora.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i2.815>

History Artikel:

Received: 28 April 2025 | Accepted: 27 Juni 2025

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan mengharuskan pemerintah daerah mengelola tata kelola pemerintahan secara optimal guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Puspitaningrum, 2016). Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 yang menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola urusan publik sesuai kehendak masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah wajib menciptakan pemerataan pembangunan dan memanfaatkan seluruh potensi daerah, sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 tentang kewenangan otonomi daerah. Ketentuan hukum ini memberikan mandat lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan, termasuk merencanakan pengembangan berdasarkan potensi lokal, melakukan pengendalian, serta penilaian kinerja, yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas seluruh wilayah (Kristanto, 2014). Salah satu potensi yang di maksud adalah terdapat pada bidang pariwisata.

Bidang kepariwisataan memiliki peluang besar sebagai penggerak utama peningkatan taraf hidup masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi (Widiastuti, 2010). Sektor kepariwisataan nasional menempati posisi strategis dalam perekonomian dan diyakini dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan sosial (Rasyid, 2024). Selain itu, bidang ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu kabupaten yang berpotensi pada provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Barat memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah seperti Pantai Senggigi, Senggigi, Gili Nanggu, dan Gili Kedis. Namun, pengembangan sektor ini memerlukan dukungan anggaran yang efektif dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Daerah (APBD). APBD berperan sebagai salah satu alat kebijakan paling penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Sebagai sebuah mekanisme perencanaan, APBD memegang peranan kunci dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi Pemda. Anggaran ini berfungsi untuk mengukur pemasukan dan belanja, mendukung proses penetapan kebijakan dan realisasi program pembangunan, memberikan wewenang dalam perencanaan belanja ke depan, menjadi acuan dalam menetapkan

indikator penilaian kinerja, sarana pemberdayaan sumber daya manusia, serta media sinkronisasi kegiatan antar divisi dalam instansi (Wahyuni, 2023).

Fungsi strategis ini menempatkan Dinas Pariwisata setempat dalam mengelola anggaran untuk pengembangan sektor ini. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan pariwisata. Kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi keuangan wilayahnya dapat dinilai melalui berbagai indikator rasio keuangan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran. Berikut tabel realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022-2024

No	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi	%	Tahun
1	1.440.554.100	1.126.984.100	313.570.000	21.77	2022
2	7.647.354.497	7.169.484.258	477.870.239	6.24	2023
3	9.903.477.491	9.162.242.346	741.235.145	7.49	2024

Sumber: (Barat, 2022, 2023, 2024)

Bedasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, terlihat bahwa efisiensi anggaran di atas 20%, namun, pada tahun 2023. dan 2024, tingkat efisiensi menurun menjadi 6.24% dan 7.49%. Hal ini menunjukkan bahwa target dan realisasi anggaran setelah tahun 2022 meningkat. Seperti yang diketahui bahwa periode 2022-2024 merupakan masa krusial untuk mengevaluasi upaya pemulihan dan strategi masa depan sektor pariwisata pasca-pandemi global. Yani et al. (2022) menyatakan bahwa dampak Pandemi Covid-19 di sektor pariwisata Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat sangat signifikan dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang menurun drastis, okupansi perhotelan yang turun menjadi sekitar 20% dari sebelumnya 47%, pengurangan tenaga kerja 15.000 orang, tingkat perhotelan, dan dampak usaha lainnya.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagian kebijakan mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang realokasi anggaran, refocusing kegiatan, serta percepatan pengadaan barang/jasa guna penanganan pandemi.

Perubahan regulasi di bidang keuangan dan stabilisasi sistem keuangan nasional maupun daerah berdampak besar pada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan prioritas dengan menyusun anggaran belanja berdasarkan tingkat kepentingannya. Optimalisasi belanja tidak terduga (BTT) menjadi salah satu langkah dalam merealisasikan *refocusing* dan realokasi APBD, dengan berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Penanganan Cepat Covid-19 di Pemerintah Daerah (Ihyani et al., 2024). Terkait sektor industri pariwisata, maka hal tersebut memunculkan kebutuhan mendesak akan ketahanan dan kemampuan untuk memulai kembali (*restart*) kegiatan pariwisata (Pariwisata, 2024).

Dalam konteks ini, diperlukan sebuah analisis kinerja keuangan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian target anggaran semata, tetapi juga pada keputusan finansial Dinas Pariwisata secara efektif yang mencerminkan dan mendukung reposisi strategis serta adaptasi terhadap lanskap pariwisata yang baru. Misalnya, perubahan preferensi wisatawan pasca-pandemi menuju udara segar, pegunungan, alam, serta aktivitas kesehatan dan luar ruang menuntut alokasi finansial yang adaptif. Hal ini mengalami pergeseran dari promosi massal menuju dukungan infrastruktur kesehatan dan keselamatan (CHSE) atau pengembangan ekowisata (Yani et al., 2022). Sehingga, evaluasi kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur seberapa tanggap dan fleksibel entitas tersebut dalam menghadapi perubahan eksternal.

Kinerja keuangan yang kuat memiliki hubungan langsung dengan kemajuan pembangunan pariwisata. Generasi pendapatan yang solid, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyediakan tulang punggung finansial yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan inisiatif pengembangan pariwisata. Belanja yang efisien dan efektif, pada gilirannya, secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan nyata dalam infrastruktur pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini, dan penguatan upaya pemasaran dan promosi. Semua elemen ini diakui sebagai pilar fundamental pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Hubungan antara kinerja keuangan dan pertumbuhan pariwisata bukanlah hubungan satu arah, melainkan siklus yang saling menguntungkan. Manajemen keuangan yang baik, termasuk

investasi strategis dalam infrastruktur pariwisata dan modal manusia, memungkinkan pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang berhasil, pada gilirannya, menarik lebih banyak pengunjung, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Analisis ini akan secara aktif mencari bukti dari hubungan timbal balik ini di Kabupaten Lombok Barat, mengidentifikasi apakah siklus ini berfungsi secara efektif atau jika ada hambatan di mana input finansial tidak menghasilkan hasil pariwisata yang diinginkan, atau di mana pertumbuhan pariwisata tidak cukup meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, (2010) menyatakan bahwa sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kemudian, Hadia et al. (2024) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah NTT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan dampaknya terhadap pengembangan pariwisata selama periode 2022-2024. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertama, mengevaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat selama periode yang ditentukan. Kedua, menilai rasio kemandirian keuangan daerah. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi langsung dan tidak langsung dari kinerja keuangan terhadap indikator-indikator kunci pengembangan pariwisata, seperti jumlah kunjungan wisatawan. Terakhir, merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan praktik manajemen keuangan dan strategi pengembangan pariwisata secara keseluruhan di Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari dokumen keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Adapun lokasi penelitian yakni pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dengan objek berupa Data anggaran dan kinerja sektor pariwisata 2022–2024.

Sumber data berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

tahun 2022–2024. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari website resmi Kabupaten Barat dan PPID. Adapun teknik analisis data dengan melihat rasio berikut.

Pertama, Rasio Efektivitas PAD di ukur dengan melihat kemampuan dinas dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Kedua, Rasio Efisiensi Belanja dengan melihat sejauh mana tingkat efisiensi dana yang dibelanjakan untuk mencapai output yang direncanakan. Ketiga, Rasio Keserasian Belanja yakni dengan menganalisis keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, yang menunjukkan fokus investasi dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2022-2024 menghadapi keterbatasan data. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang komprehensif dan spesifik untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tidak sepenuhnya tersedia dalam sumber daya yang diberikan untuk semua tahun. Berikut tabel realisasi pendapatan dinas pariwisata lombok barat.

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Terkait Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (2022-2024)

Uraian Pendapatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata	Data tidak tersedia secara eksplisit	Rp 47.192.466.439 (13.83% dari target)	Rp 57.163.285.238,97 (14.47% dari target)
Pajak Hotel (Lombok Barat)	Data tidak tersedia secara eksplisit	Rp24.732.150.502,79 (7.25% dari target)	Rp 25.944.330.468,46 (6.57% dari target)
Pajak Restoran (Lombok Barat)	Data tidak tersedia secara eksplisit	Rp22.133.371.187,03 (6.49% dari target)	Rp 30.838.051.899,78 (7.81% dari target)
Pajak Hiburan	Data tidak tersedia secara eksplisit	Rp 326.770.954 (0.10% dari target)	Rp 380.902.870,73 (0.09% dari target)

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 mencapai Rp 47.192.466.439, Meskipun data

realisasi PAD pada tahun 2022 tidak eksplisit tersedia, namun, jika dibandingkan dengan data Bapenda Tahun 2021 sebesar Rp15.380.084.732,96 (35.66%), maka pada tahun 2023 dan 2024 sudah mengalami peningkatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PAD di wilayah Lombok Barat pasca-pandemi terus mengalami peningkatan.

Dari tahun 2023 ke 2024 terdapat kenaikan nominal sebesar Rp 9,97 M (21,1%). Namun, pencapaian terhadap target masih rendah (hanya 13-14%), menunjukkan target yang terlalu tinggi atau hambatan dalam realisasi pendapatan. Selanjutnya Pajak Hotel pada tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan kenaikan nominal meskipun cukup kecil (+Rp 1,21 M atau 4,9%), tetapi persentase pencapaian target menurun. Hal ini menunjukkan indikasi sektor hotel belum pulih. Kemudian, Pajak Restoran menunjukkan lonjakan signifikan (+Rp 8,7 M atau 39,3%), menunjukkan peningkatan aktivitas restoran. Pencapaian target juga naik, akan tetapi masih di bawah 10%. Terakhir, Pajak Hiburan memiliki kontribusi sangat kecil (<1% dari target), hal ini dapat terjadi akibat sektor hiburan (club, karaoke, dll.) kurang berkembang atau banyak yang tidak terdata.

Adapun realisasi belanja dinas pariwisata kabupaten lombok barat dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (2023-2024)

Uraian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Realisasi 2023	Anggaran 2024 (Rp)
Total Belanja	7.647.354.497	7.169.484.258	93,75%	9.903.477.491
Belanja Operasi	6.738.613.297	6.545.590.258	97,14%	7.702.808.491
Belanja Pegawai	3.729.885.017	3.592.603.252	96,32%	4.105.667.491
Belanja Barang	3.008.728.280	2.952.987.006	98,15%	3.597.141.000
Jasa				
Belanja Modal	908.741.200	623.894.000	68,65%	2.200.669.000
Belanja Modal	12.000.000	0	0,00%	47.500.000
Peralatan Mesin				
Belanja Modal	779.836.200	552.904.000	70,90%	2.153.169.000
Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal	116.905.000	70.990.000	60,72%	Data tidak tersedia secara eksplisit
Aset Tetap Lainnya				

Sumber: Data diolah (2025)

Pada tabel 3 di atas, analisis realisasi anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tengah menghadapi tantangan ketersediaan data yang komprehensif. Data Realisasi Belanja 2022 tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber yang diberikan. Data Anggaran 2024 merupakan rencana, bukan realisasi secara komprehensif. Data realisasi yang terperinci hanya untuk tahun 2023.

Anggaran yang direncanakan untuk Dinas Pariwisata Lombok Barat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.903.477.491,00. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 7.702.808.491,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 2.200.669.000,00. Proporsi belanja operasional yang tinggi ini menunjukkan fokus yang signifikan pada biaya operasional rutin.

Untuk tahun 2023, realisasi total belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp 7.169.484.258 dari anggaran Rp 7.647.354.497, menunjukkan tingkat penyerapan sebesar 93,75%. Namun, terlihat perbedaan yang signifikan. Belanja Operasi menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi, yaitu 97,14% (Rp 6.545.590.258 terealisasi dari Rp 6.738.613.297 dianggarkan), termasuk Belanja Pegawai 96,32% dan Belanja Barang Jasa 98,15%. Sebaliknya, Belanja Modal memiliki tingkat penyerapan yang lebih rendah, yaitu 68,65% (Rp 623.894.000 terealisasi dari Rp 908.741.200 dianggarkan). Penyerapan Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai titik 0%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70,90%, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60,72%.

Perbedaan yang signifikan antara penyerapan belanja operasional yang tinggi dan belanja modal yang lebih rendah pada tahun 2023 menunjukkan adanya kecenderungan atau kemudahan yang lebih besar dalam membelanjakan biaya operasional sehari-hari (gaji, layanan rutin) dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Hal ini merupakan temuan penting karena meskipun penyerapan operasional yang tinggi menjamin kelancaran fungsi harian, penyerapan belanja modal yang secara konsisten lebih rendah mengimplikasikan tantangan dalam pelaksanaan proyek pengembangan besar atau investasi dalam infrastruktur pariwisata. Ketidakseimbangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, mengingat pengembangan infrastruktur adalah komponen kunci. Potensi alasan untuk disparitas ini perlu ditelusuri, seperti proses pengadaan yang kompleks untuk proyek modal, keterlambatan dalam perencanaan, atau kurangnya kesiapan untuk investasi skala besar.

Selanjutnya, analisis rasio keuangan memberikan gambaran terstandarisasi mengenai

kehatan dan kinerja finansial suatu organisasi. Hal tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: } (\text{PAD} / \text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah}) \times 100\%$$

Pada LRA tahun 2022 sudah tersedia, namun, total PAD tidak tersedia secara eksplisit, sehingga yang dapat dihitung adalah dari tahun 2023 hingga 2024. Berikut tabel rasio kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2023 hingga 2024,

Tabel 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dinas Pariwisata Lombok Barat Tahun 2023-2024

Tahun	Total Realisasi PAD	Total Transfer Pusat	%
2023	47,192,466,439	1,354,268,557,882	3.48
2024	57,163,285,238.97	1,466,789,004,000	3.90

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan sebesar 0.42% (dari 3.48% ke 3.90%) yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah PAD sebesar Rp 9.97 M (+21.1%), namun, hal tersebut juga perlu dilihat dari meningkatnya transfer pusat sebesar Rp 112.52 M. Apabila dilihat dari tingkat kemandirian, maka termasuk kategori "Kurang Mandiri" (Permendagri, 2020) karena rasio tersebut kurang dari 25%. Jika dilihat dari tingkat ketergantungan pada pusat, maka tergolong sangat tinggi yakni transfer pusat 26-27x lebih besar dari PAD. Dengan demikian, diperlukan pengembangan pada sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan pariwisata, yang didanai melalui alokasi anggaran. Program-program ini dikategorikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Lima kategori program utama Dinas Pariwisata Lombok Barat meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Di bawah program-program tersebut, berbagai kegiatan spesifik telah dilaksanakan. Termasuk pengelolaan destinasi, penerbitan tanda daftar usaha pariwisata, inisiatif pemasaran domestik dan internasional, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (meliputi pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan, penyediaan infrastruktur, fasilitasi kekayaan intelektual), dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (misalnya, program pelatihan

dan sertifikasi kompetensi). Sebagai contoh konkret, pada tahun 2023, Dinas Pariwisata menyelenggarakan serangkaian program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pariwisata. Pelatihan tersebut mencakup Manajemen Desa Wisata, Pemandu Wisata Gunung, dan Manajemen Toilet Destinasi Pariwisata, masing-masing dengan 40 peserta.

Salah satu indikator langsung dari keberhasilan pengembangan pariwisata adalah tren kunjungan wisatawan. Berikut data kunjungan wisatawan pada kabupaten lombok barat.

Tabel 5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2022	184.000	289.378	157,27
2023	185.000	320.658	173,33
2024	186.000	439.138	236,10

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja sangat kuat dengan realisasi selalu melampaui target (capaian >100% tiap tahun). Selain itu, peningkatan yang cukup signifikan yaitu capaian naik dari 157% (2022) menjadi 236% (2024), menunjukkan perbaikan dalam perencanaan atau eksekusi pendapatan.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan kontribusinya terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Apabila melihat pada peningkatan generasi PAD langsung maka, Dinas Pariwisata perlu mengimplementasikan strategi yang lebih proaktif dan efektif untuk mengumpulkan retribusi dari objek dan layanan pariwisata yang dikelola langsung. Hal ini dapat mencakup peninjauan tarif retribusi yang ada agar relevan, peningkatan mekanisme pemantauan, serta secara aktif mengeksplorasi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan dan terkait langsung dengan kegiatan pariwisata.

Dalam mengatasi tantangan yang diamati dalam penyerapan belanja modal dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata. Hal tersebut diharuskan untuk melibatkan tinjauan terperinci terhadap keterlambatan proyek di masa lalu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal untuk manajemen proyek dan pengadaan, serta penguatan komitmen manajemen untuk mempercepat penyelesaian proyek. Kemudian, untuk memastikan bahwa alokasi anggaran di masa depan, khususnya untuk belanja modal, selaras secara

strategis dengan rencana induk pengembangan pariwisata jangka panjang dan responsif terhadap preferensi wisatawan yang berkembang, maka dapat memprioritaskan investasi yang menghasilkan pengembalian tertinggi pada pengembangan pariwisata.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang menarik antara peningkatan pendapatan, tantangan penyerapan anggaran, dan ketergantungan pada transfer pusat. Meskipun data yang tersedia terbatas khususnya untuk tahun 2022. Beberapa tren utama dapat diidentifikasi untuk memberikan gambaran menyeluruh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata mengalami kenaikan nominal sebesar 21,1%, dari Rp47,19 miliar pada 2023 menjadi Rp57,16 miliar pada 2024. Namun, capaian ini hanya memenuhi 13–14% dari target yang ditetapkan, mengindikasikan bahwa target mungkin terlalu ambisius atau terdapat kendala dalam optimalisasi pemungutan pendapatan.

Komponen PAD dari sektor pariwisata didominasi oleh Pertama, Pajak Restoran: di mana hal tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan (+39,3%), mencerminkan peningkatan aktivitas kuliner seiring pulihnya pariwisata pasca-pandemi. Kedua, Pajak Hotel yang berkisar sebesar 4,9%, dengan capaian target menurun dari 7,25% (2023) menjadi 6,57% (2024). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sektor akomodasi belum sepenuhnya pulih atau terdapat kebocoran dalam pendataan. Ketiga, Pajak Hiburan yang berkontribusi sangat minimal (<1%). Hal ini dapat disebabkan sektor hiburan seperti klub malam dan karaoke kurang berkembang atau belum terdata dengan baik.

Dari segi kinerja belanja, pada 2023, realisasi belanja Dinas Pariwisata mencapai 93,75% dari total anggaran, dengan rincian pertama, Belanja Operasional dengan tingkat Penyerapan tinggi (97,14%), terutama untuk gaji pegawai (96,32%) dan barang/jasa (98,15%). Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan operasional harian. Kedua, Belanja Modal dengan tingkat penyerapan sebesar 68,65%, dengan beberapa komponen seperti belanja peralatan mesin tidak terealisasi sama sekali (0%). Rendahnya penyerapan modal mengindikasikan hambatan dalam proyek infrastruktur, seperti proses pengadaan yang rumit, keterlambatan perencanaan,

atau ketiadaan kesiapan teknis.

Selanjutnya, dari sisi Rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah, yakni 3,48% (2023) dan 3,90% (2024), tergolong dalam kategori "Kurang Mandiri" menurut Permendagri Tahun 2020. Transfer pusat 26–27 kali lebih besar daripada PAD, menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi.

Terakhir, melalui indikator perkembangan pariwisata, yakni kunjungan wisatawan yang terus melampaui target yakni pada tahun 2022 jumlah wisatawan sebanyak 289.378 orang (157,27% dari target) dan tahun 2024 sebanyak 439.138 wisatawan (236,10% dari target). Pertumbuhan tersebut mencerminkan daya tarik destinasi yang kuat, tetapi tidak sepenuhnya berkontribusi pada PAD.

Berdasarkan data tersebut, maka untuk penguatan PAD diperlukan perluasan basis pajak dan retribusi, terutama dari sektor hotel dan hiburan. Kemudian, penerapan sistem digital untuk pemungutan pajak guna mengurangi kebocoran. Bagi belanja modal, maka disarankan untuk lebih berfokus pada proyek infrastruktur prioritas, seperti pengembangan destinasi dan aksesibilitas. Serta kolaborasi dengan swasta melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Terakhir, untuk evaluasi target dan kebijakan maka disarankan untuk melakukan penyusunan target berbasis data riil dan potensi daerah dan peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Kinerja Dinas Pariwisata Lombok Barat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kemajuan di sektor kunjungan wisatawan, tetapi tantangan besar dalam kemandirian fiskal dan penyerapan anggaran. Dengan strategi yang tepat—terutama peningkatan PAD dan percepatan belanja modal—daerah ini berpotensi menjadi destinasi pariwisata yang mandiri dan berkelanjutan. Namun, hal ini harus didukung oleh ketersediaan data yang lengkap dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Pada penelitian mendatang, dapat melakukan studi kualitatif berupa wawancara dengan pelaku usaha (hotel, restoran, hiburan) untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembayaran pajak. Selanjutnya dengan melakukan analisis proses pemungutan pajak oleh Bapenda untuk menemukan celah inefisiensi. Apabila tetap menggunakan studi kuantitatif, maka dapat membandingkan potensi pajak pariwisata (berdasarkan jumlah usaha terdaftar) dengan

realisasi penerimaan dengan mengevaluasi dampak insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, maka dapat membandingkan strategi Lombok Barat dengan daerah mandiri seperti Bali atau Yogyakarta dalam mengelola PAD pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda, P. L. B. (2021). *Realisasi Pad Sektor Pariwisata 2021.pdf*.
- Barat, D. K. L. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*.
- Hadia, U., Tameno, N., & Tungga, C. A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 149–168. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.706>
- Ihyani, L., Marlina, F. N., Dwi, E., Marswandi, P., & Kunci, K. (2024). *Pengaruh Refocusing dan Realokasi Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 10, 249–253.
- Indonesia, M. D. N. R. (2020). *Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*.
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. In *Metallurgical and Materials Transactions A* (Vol. 30, Issue 8, p. 2221).
- Indpres nomor 4 tahun 2020, 22698 (2020).
- Indonesia, U.-U. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. In *Metallurgical and Materials Transactions A* (Vol. 30, Issue 8, p. 2221).
- Kristanto, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Dilihat Dari Pendapatan Daerah Pada APBD 2010-2012. In *Procedia Manufacturing* (Vol. 1, Issue 22 Jan, pp. 1–17).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 1447, 7.
- PARIWISATA, P. K. S. D. (2024). *Laporan kinerja pemerintah 20 2023* (Issue 13).
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. In 2020.
- Puspitaningrum, M. (2016). Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Diy Dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Sebagai Variabel Intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 45–56. <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7999>
- Rasyid, A. F. R. R. (2024). Analisis Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. In *Repository.Unmul.Ac.Id* (p. 7763). <http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/1523/>

Wahyuni, N. (2023). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.*

Widiastuti, N. K. (2010). Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali*, 292–311.

Yani, A., Harjito, & Haryandi. (2022). *Analisis Dampak Covid-19 Pada Sektor Pariwisata Di Pulau Lombok Prvinsi Nusa Tenggara Barat.* 6(1), 43–49.